PRAMUWISATA
2019

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.8, LD 2019/ NO. 8, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PRAMUWISATA

ABSTRAK : - Pramuwisata merupakan jasa pariwisata yang perlu adanya pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna maka penyelenggaraan Pramuwisata diperlukan pengaturan yang ditetapkan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 52 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PERDA No. 14 Tahun 2015; PERDA No. 7 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pramuwisata mengatur tata kelola profesi pramuwisata untuk meningkatkan layanan wisata di Kabupaten Pangandaran. Perda ini menetapkan penggolongan pramuwisata menjadi umum dan khusus, dengan persyaratan sertifikasi kompetensi, sertifikat pemajuan kebudayaan Pangandaran, serta Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Peraturan ini juga mengatur tugas, hak, kewajiban, dan kode etik pramuwisata, termasuk kerjasama dengan biro perjalanan wisata serta pengelolaan organisasi pramuwisata. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, atau pencabutan izin pramuwisata.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 3 Oktober 2019
- Jumlah Penjelasan 5 halaman.
- Jumlah Lampiran 6 halaman.